



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan  
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pertanian

# **PROGRAM KERJA**

## **PPPPTK PERTANIAN**

### **TAHUN 2020**





---

# PROGRAM KERJA PPPPTK PERTANIAN TAHUN 2020

---



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PERTANIAN**

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya program kerja lembaga Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pertanian Tahun 2020. Program ini merupakan panduan atau pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan kelembagaan tahun 2020 menuju tercapainya kepada Visi dan Misi yaitu “Terselenggaranya Layanan Prima untuk Membentuk SDM Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Bermartabat serta Penjaminan Mutu Pendidikan yang Terstandar”, untuk merwujudkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020 yaitu : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Bangsa Kuat”.

PPPPTK Pertanian juga dapat mengambil peran besar demi terwujudnya *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini, bila ditinjau dari “Strategi utama MP3EI” yaitu ; Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian yang merupakan bagian dari tanggung jawab PPPPTK Pertanian untuk pengembangannya, dapat berkontribusi melalui pengembangan dan pemberdayaan Guru dengan mengarahkannya kepada pengembangan kegiatan pembelajaran praktis yang berbasis kepada potensi ekonomi lokal; dan penguatan kemampuan SDM dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melalui diklat peningkatan kompetensi Guru.

Akhirnya kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan Program ini.



**Dr.Ir. Raden Ruli Basuni, M.P.**  
**NIP. 196307201990011001**

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Filosofis Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	3
C. Landasan Operasional .....	5
D. Landasan Hukum .....	10
BAB II. ANALISIS KONDISI.....	12
A. Kondisi Internal.....	12
B. Kondisi Eksternal .....	15
C. Tantangan Kedepan.....	16
D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK Pertanian .....	19
BAB III. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DAN TUJUAN STRATEGIS .....	22
A. Visi dan Misi PPPPTK Pertanian.....	22
B. Nilai-Nilai .....	14
C. Tujuan Strategis .....	16
D. Sasaran Strategis .....	16
BAB IV. PROGRAM KERJA PPPPTK PERTANIAN TAHUN 2020 .....	20
A. Deskripsi Program.....	20
BAB V. MONITORING DAN EVALUASI.....	31
A. Sasaran M&E Kependidikan.....	31
B. Teknik Pengukuran .....	31
BAB VI PENUTUP.....	32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pembangunan pendidikan akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global di era perekonomian berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Economy*) yang semakin ketat. Untuk itu setiap warga negara diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas serta daya saing.

Menjawab tantangan global tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah banyak melakukan reformasi pendidikan diantaranya adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan pembangunan pendidikan yang meliputi penataan manajemen, peningkatan kualitas dan relevansi, peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan dan penerapan Iptek, pembaharuan kurikulum, penerapan manajemen berbasis sekolah, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; PP 52 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No 74 tahun 2008 tentang Guru; Permendiknas No.16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Depdiknas. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Dengan menjabarkan dan mengimplementasikan seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Pertanian telah bergerak melakukan berbagai pembaharuan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal telah dan akan terus melakukan pembenahan organisasi, manajemen, sarana dan prasarana,

peningkatan mutu sumberdaya manusia dan pengembangan program-program inovatif dan implementatif dibidang pendidikan kejuruan pertanian serta model-model pembelajarannya.

Sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya (Permendikbud Nomor 41 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan), PPPPTK Pertanian Cianjur selama berdirinya telah menjalankan perannya dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian. Sampai tahun 2009 telah melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga kependidikan melalui berbagai jenis diklat diantaranya diklat manajemen Kepala Sekolah, calon Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, Pengawas, Ka. Program Keahlian, Pengelola Unit produksi, Guru Bidang Studi, Guru Adaptif, Teknisi dan Laboran, Operator Komputer dan lain-lain. Untuk melakukan percepatan pemerataan dan perluasan akses serta peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), PPPPTK Pertanian juga telah mengembangkan strategi penyelenggaraan diklat Jarak Jauh (PJJ) dan pendirian *Workstation*.

Selain diklat tersebut di atas juga melaksanakan diklat-diklat kewirausahaan dari *stakeholders* di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan berbagai institusi lainnya seperti Kementerian Agama, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Perhubungan, Pemda Kabupaten/Kota, Sekretariat Kabinet. Pelayanan tersebut merupakan bagian pengembangan jaringan kerjasama yang telah dipercayakan kepada PPPPTK Pertanian Cianjur. Kemampuan diklat yang dimiliki PPPPTK Pertanian Cianjur ternyata juga diminati oleh masyarakat untuk belajar pertanian baik secara perorangan maupun kelembagaan. Jenis-jenis Diklat yang telah diikuti masyarakat antara lain diklat dibidang budidaya tanaman, ternak, ikan, teknologi hasil pertanian dan manajemen khususnya *Outward Management Training*.

Disamping menjalankan fungsi diklat, PPPPTK Pertanian Cianjur juga secara aktif meningkatkan mutu SMK Pertanian melalui berbagai program diantaranya pengembangan kurikulum, pembinaan dan bantuan teknis dan manajerial, dan kegiatan yang bersifat konsultatif seperti misalnya pendampingan untuk SMK-Bertaraf Internasional. Seluruh upaya yang telah dilakukan oleh PPPPTK Pertanian tersebut secara nyata telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan SMK Pertanian. Secara kualitatif telah menunjukan *trend* peningkatan mutu SMK Pertanian untuk dikembangkan menjadi sekolah-sekolah bertaraf internasional.



Otonomi daerah telah mengatur pembagian wewenang antara pusat dan daerah yang diatur melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal di atas, menuntut perubahan peran, tugas dan fungsi PPPPTK Pertanian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan khususnya guru SMK Pertanian dan pendidikan pertanian bagi guru SD, SMP dan SMA. Konsekuensi logis dari kebijakan otonomi daerah tersebut bagi PPPPTK Pertanian sebagai bagian dari Pemerintah Pusat adalah berkurangnya akses langsung ke SMK Pertanian dalam segala hal baik tenaga kependidikan, teknis maupun manajerial sekolah. Oleh karena itu PPPPTK Pertanian secara bertahap harus melakukan penyesuaian lingkup kegiatan agar tetap dapat menjadi pengembang pendidikan kejuruan pertanian di Indonesia dengan jaringan global.

Paradigma baru yang dikembangkan oleh PPPPTK Pertanian Cianjur dimasa depan adalah peningkatan mutu layanan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian berbasis pedesaan melalui pendidikan kejuruan pertanian dan perluasan akses pelayanan melalui jejaring/*Network* dengan seluruh kabupaten/kota. Perluasan akses pelayanan diklat juga akan dilakukan dengan berbagai strategi penyampaian diklat antara lain dengan memperkuat diklat jarak jauh melalui *e-training*, dan diklat dengan *system modular*. Upaya untuk memperluas dan mempertajam kedudukan dan peranan PPPPTK Pertanian dalam peningkatan mutu pendidikan kejuruan pertanian kurun lima tahun kedepan dituangkan dalam Rencana Program Strategis 2020 - 2024.

## **B. Landasan Filosofis Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

Sejalan dengan landasan filosofis pembangunan pendidikan nasional, maka landasan filosofis pengembangan dan pemberdayaan PTK juga mengacu kepada Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang menjunjung tinggi dan memegang teguh norma agama dan kemanusiaan, norma persatuan bangsa, norma kerakyatan dan demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial. Selanjutnya dinyatakan didalam Program Depdiknas tahun 2015–2019, bahwa penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan paradigma pendidikan yang berlaku universal. Landasan

filosofis dan paradigma pendidikan yang terkait langsung dengan tupoksi PPPPTK Pertanian antara lain adalah:

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Pembangunan manusia seutuhnya mengandung makna bahwa pendidikan harus menempatkan manusia sebagai subjek. Memperlakukan anak sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Anak yang sedang mengalami pertumbuhan perlu dididik untuk dapat mengembangkan potensinya. Anak perlu dididik kepribadiannya, dan juga diarahkan untuk dapat memaksimalkan talentanya, sehingga anak tidak boleh dijadikan objek. Guru sebagai fasilitator tidak bisa berbuat semauanya, sebaliknya ia harus menyiapkan apa yang dibutuhkan anak untuk menemukan bakatnya, serta bagaimana menolongnya agar mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri masing-masing anak. Bukan hanya pengajaran yang dibutuhkan tetapi juga pendidikan yang melibatkan teladan hidup. Implementasi dalam kegiatan diklat PTK pada PPPPTK Pertanian adalah diklat peningkatan kompetensi guru dalam bidang pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual.

2. Pembelajaran Sepanjang Hayat

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 5 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yaitu bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sistem pembelajaran sepanjang hayat juga bermakna bahwa pendidikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia bagi peserta didik. Mereka dapat mengikuti pendidikan secara lintas jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diselenggarakan secara terbuka, melalui tatap muka ataupun



jarak jauh dengan menggunakan sarana dan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi filosofi ini pada PPPPTK Pertanian adalah penyelenggaraan diklat untuk purna tugas dan masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan/memperoleh kompetensi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

### 3. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*)

Semua bangsa maju sepakat bahwa peran peningkatan mutu pendidikan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasyarat untuk meraih kemakmuran (*prosperity*) dalam kancah pergaulan internasional. Oleh karena itu fokus pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang kini dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. ESD adalah proses belajar untuk membuat keputusan yang memperhatikan masa depan jangka panjang dalam dimensi ekonomi, ekologi dan pembangunan yang adil bagi semua masyarakat. Pilar ESD ini terdiri dari ekonomi, lingkungan dan sosial. ESD mempunyai tujuan; 1. Setiap orang harus memperoleh kecakapan hidup untuk hidup dimasyarakat; 2. Pembangunan ekonomi bertumpu pada pembangunan manusia dan modal sosial; 3. Sistem pendidikan harus dapat mewadahi orang dengan ketidak beruntungan sosial atau kesulitan/cacat fisik. Dimensi ESD meliputi Kesadaran lingkungan, Kompetensi pengetahuan ekonomi dalam perspektif sepanjang hayat, Modal manusia dan sosial, dan pendidikan inklusif.

Dunia pendidikan sebagai salah satu faktor yang dapat menjamin keberlangsungan pranata sosial dalam kehidupan harus terus dan selalu menanamkan jiwa untuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pilar tentang kesadaran lingkungan adalah melalui penanaman jiwa peduli terhadap lingkungan pada peserta didik yang harus dimulai dari seorang pendidik atau Guru. PPPPTK Pertanian telah dan akan terus memberikan materi yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk setiap diklat yang diselenggarakan. Materi lingkungan hidup ini merupakan materi wajib yang diberikan pada setiap kegiatan diklat sejumlah 2 – 5 persen dari jumlah jam diklat yang dilakukan. Bentuk lain dalam implementasi ESD yang dilakukan oleh PPPPTK Pertanian adalah diklat kecakapan hidup untuk guru SD, SMP, dan SMA.

### C. Landasan Operasional

Sesuai dengan Tema Pembangunan Pendidikan ke 3 (2015-2019) adalah ”penguatan layanan pendidikan” maka Visi Kemendikbud untuk lima (5) tahun kedepan adalah ”Terselenggaranya layanan Prima Pendidikan Nasional Untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”. Untuk mencapai Visi tersebut maka dirumuskanlah Misi 5 K yaitu Meningkatkan Ketersediaan layanan, Memperluas Keterjangkauan layanan, meningkatkan Kualitas/mutu dan relevansi layanan, memperoleh Kesetaraan dalam memperoleh layanan, dan menjamin Kepastian memperoleh layanan. Kemudian dari Misi tersebut dijabarkan kedalam Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Strategi Pencapaian Tujuan Strategis. Dari seluruh strategi pembangunan pendidikan tersebut dirumuskan menjadi Strategi Umum dan selanjutnya dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional merupakan landasan operasional bagi PPPPTK Pertanian.

1. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Guru; merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus terus ditingkatkan kompetensinya. Bagi guru yang telah memiliki sertifikat profesi, kompetensi harus terus dikembangkan dan dipertajam dengan inovasi dan teknologi baru yang sesuai dengan perkembangan IPTEK. Demikian juga Guru harus terus didorong dan difasilitasi untuk mengembangkan profesionalismenya melalui kelompok kerja guru (MGMP). Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang dimulai dengan uji kompetensi.
2. Peningkatan mutu lembaga, peningkatan kompetensi guru salah satunya dipengaruhi oleh lembaga penyelenggara diklat. Untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat sesuai dengan apa yang diharapkan maka diperlukan peningkatan mutu lembaga diklat. Peningkatan mutu lembaga (PPPPTK) Pertanian meliputi peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM), mutu manajemen/pengelolaan, dan mutu sarana prasarana, serta sistem yang digunakan.
3. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, pada era desentralisasi pendidikan ada gejala penurunan kualitas dan kompetensi pengelola pendidikan, baik yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Untuk ini, berbagai bentuk dan model pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan

tersebut akan dikembangkan. PPPPTK Pertanian telah melakukan peningkatan kompetensi manajerial bagi pengelola sekolah (Kepala dan wakil kepala sekolah), dan akan terus di kembangkan pada tahun-tahun berikutnya.

4. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha, Metodologi pendidikan yang akan dikembangkan oleh PPPPTK Pertanian adalah metodologi untuk pendidikan dan latihan. PPPPTK Pertanian telah dan akan terus mengembangkan metodologi diklat yang diharapkan dapat mengembangkan jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha. Dengan memberikan perhatian penuh dalam pengembangan wahana diklat bidang pertanian, perikanan dan teknik kimia.
5. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK bidang pendidikan, kegiatan ini berupa pengembangan sistem, metode dan materi pembelajaran dengan menggunakan ICT. Kegiatan ini juga akan mengembangkan sistem jaringan informasi, infrastruktur dan SDM untuk mendukung implementasinya, baik untuk kepentingan manajemen pendidikan maupun proses pembelajaran. Dengan menggunakan ICT dalam diklat reguler, diklat jarak jauh, seluruh peserta diklat akan memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan.
6. Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan lulusan yang terampil. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan potensi di masing-masing koridor ekonomi. Di setiap kabupaten/kota minimal harus dikembangkan pendidikan tinggi setingkat akademi (*community college*) atau politeknik dengan bidang-bidang yang sesuai dengan potensi di kabupaten tersebut. Pengembangan *community college*, yang menyelenggarakan program diploma 1, diploma 2 dan diploma 3, diharapkan akan menghasilkan lulusan yang langsung dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Oleh karena itu pengembangan *community college* dilakukan dengan secara bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha, dan universitas sebagai pengelola *community college*. Mutu *community college* dibina oleh politeknik yang dikembangkan di ibukota provinsi. Politeknik tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi dan keunggulan setiap koridor ekonomi. Selain pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dengan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pengembangan pelatihan kerja, dan

pengembangan lembaga sertifikasi. PPPPTK Pertanian sebagai lembaga yang telah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam mengembangkan program diploma, akan berperan aktif mengembangkan SMK sebagai *community college* dalam rangka mempercepat terciptanya lulusan yang dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di setiap koridor ekonomi.

7. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, kegiatan ini termasuk dalam prioritas kebijakan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan: *pertama*, bahwa kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya sementara itu ada potensi yang cukup besar pada masyarakat; *kedua*, kecenderungan arah pembangunan pendidikan yang ingin lebih banyak melibatkan partisipasi swasta di segala aspek penyelenggaraan, termasuk investasi, pengelolaan, dan pengawasan; *ketiga*, sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat akan lebih banyak memainkan perannya sebagai fasilitator pelayanan publik yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang antara lain dilakukan melalui pengendalian dan penjaminan mutu, pengembangan standar-standar, akreditasi dan sertifikasi dalam rangka desentralisasi pendidikan. Peran yang demikian ingin mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang mandiri (otonom), baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat (swasta). Hal ini sesuai dengan salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan dalam MP3EI, yaitu Dunia Usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja,
8. Koordinasi antar lembaga pusat dan daerah, sebagai bentuk penguatan konektifitas nasional yang tertuang didalam strategi utama MP3EI, merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap lembaga yang memiliki keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai. Melalui koordinasi ini diharapkan dapat terjadi suatu sinergi yang dapat meningkatkan optimasi seluruh sumberdaya dari masing-masing lembaga. PPPPTK Pertanian telah melakukan koordinasi baik secara vertikal (Direktorat Jenderal GTK dan unit utama lainnya), maupun secara horizontal (Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, LPMP, dan institute/perguruan tinggi). Koordinasi ini akan terus dilakukan dan ditingkatkan.

9. Perluasan Pendidikan Kecakapan Hidup; merupakan kegiatan strategis dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang mencakup pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam rangka pengembangan kompetensi, kepribadian, kewarganegaraan, intelektual, estetika, dan kinestik pada berbagai satuan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Tujuannya agar keluaran pendidikan memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus berkembang secara mandiri. PPPPTK Pertanian sebagai lembaga yang memiliki banyak kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan kecakapan hidup sudah melaksanakan dan akan mengembangkan konsep-konsep pengembangan kecakapan hidup untuk guru SD, SMP, dan SMA.
10. Pengembangan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal di Setiap Kabupaten/Kota; perluasan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 20/2003 yang secara bertahap akan dikembangkan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dalam lima tahun ke depan, diharapkan terdapat sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan di setiap kabupaten/kota. PPPPTK Pertanian bermitra dengan pemerintah daerah guna membantu dan mendampingi dalam menganalisis kebutuhan pengembangan sekolah yang berbasis keunggulan lokal.
11. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah *mindset* atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI), penjaminan sistem manajemen mutu, pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI

pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang. Kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- Peningkatan sistem pengendalian Internal berkoordinasi dengan BPKP dan BPK; untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang bersih efektif, efisien, produktif dan akuntabel. Sistem pengendalian internal sangat penting dikembangkan guna mendeteksi penyimpangan secara dini dan menumbuhkan tanggung jawab melalui proses evaluasi diri. Sistem ini tidak hanya dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan di tingkat pusat, tetapi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. PPPPTK Pertanian telah membentuk SPI yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan secara internal kegiatan sehari-hari yang dilakukan. SPI ini akan terus dikembangkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satuan pengawas internal
- Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; beberapa kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan, kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan, melalui: peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara
- Penataan regulasi pengelolaan lembaga; menjawab berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan, instrumen peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, standar, dan aturan pelaksanaan teknis lainnya menjadi prioritas yang tidak kalah penting untuk terus disempurnakan dan dikembangkan
- Peningkatan Pencitraan Publik; di samping terus melakukan dan memantau program, kebijakan, dan kegiatan lembaga, juga perlu melakukan sosialisasi kepada publik tentang apa yang direncanakan, yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukan perbaikan. Selain untuk melakukan sosialisasi, paparan kepada publik juga dapat menjadi sarana peningkatan citra lembaga itu sendiri. Melalui paparan tersebut, diharapkan ada masukan dari seluruh masyarakat, khususnya pemerhati pendidikan. Dengan dimilikinya sejumlah sertifikat seperti ISO 9001:20008,



17025, dan 14001, dan peraih penghargaan presiden tentang layanan prima, maka ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pencitraan.

#### **D. Landasan hukum**

Reformasi hukum dalam bidang pendidikan seluruhnya mengacu kepada amanat reformasi dalam amandemen Undang-undang dasar 1945, yang selanjutnya dijabarkan kedalam undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang melandasi penyusunan Program PPPPTK Pertanian ini. Secara rinci landasan hukum tersebut adalah :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
8. PP 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015.
11. Permen Dikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi
12. Permen Dikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
13. Permen Dikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
14. Permen Dikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian
15. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
16. Permendikbud No. 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan

17. Permendikbud No. 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru
18. Permendikbud No. 70 Tahun 2013 tentang Struktur dan Kerangka Kurikulum SMK
19. Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum 2013
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
21. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
22. Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2015 – 2019
23. Rencana Strategis Direktorat Jenderal GTK Tahun 2015 – 2019

## BAB II

### ANALISIS KONDISI

#### A. Kondisi Internal

Kondisi internal yang akan dipaparkan adalah kondisi yang dicapai selama kurun waktu tahun 2018-2019, beberapa hal yang perlu disampaikan disini hanya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi PTK, peningkatan mutu SDM PPPPTK Pertanian, dan pengembangan bahan ajar/modul.

##### 1. Peningkatan Kompetensi PTK

Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2018, jumlah SMK yang menyelenggarakan Bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Perikanan dan Kelautan dan teknik kimia masing-masing berturut-turut adalah 970 sekolah, 518 sekolah, dan 113 Sekolah. Sedangkan jumlah PTK yang ada 23.362 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah PTK pada SMK yang menyelenggarakan bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Perikanan dan Kelautan, dan Teknik Kimia

No	Jenis PTK	Jumlah
1	Guru Produktif bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi	3.134
2	Guru Produktif bidang keahlian perikanan dan kelautan dan teknik kimia	1.150
3	Guru Dasar bidang keahlian Agribisnis dan Agroteknologi (Fisika, Kimia, Biologi)	4.396
4	Guru Dasar bidang keahlian Perikanan dan Kelautan (Fisika, Kimia, Biologi)	-
5	Tenaga Administrasi/ Tenaga Laboratorium/ Tenaga Perpustakaan	4.800
6	Jumlah guru Prakarya SMP (Pertanian)	317
7	Jumlah guru Prakarya SMP (Lain-Lain)	2.802
7	Jumlah guru Kewirausahaan SMK	9.276
8	Guru Normatif SMK ( Bahasa Indonesia, Agama dan BK	5.676

<b>Total</b>	<b>31.551</b>
--------------	---------------

Diklat yang telah dilaksanakan diantaranya Diklat PKP produktif pertanian dan perikanan serta diklat adaptif mata pelajaran biologi agrobisnis, fisika agrobisnis dan kimia agrobisnis.

Berdasarkan data jumlah peserta diklat berdasarkan sasaran Program (Tabel 2.1), bahwa jumlah PTK yang telah mengikuti diklat PKP produktif pertanian sebanyak 2557 orang dari 7058 orang atau sejumlah 36,43 %. jumlah PTK yang telah mengikuti diklat adaptif mata pelajaran biologi agrobisnis, fisika agrobisnis dan kimia agrobisnis sebanyak 1028 orang dari 4396 orang atau sebanyak 24,21 %

## 2. Peningkatan Mutu SDM PPPPTK Pertanian

Peningkatan mutu SDM PPPPTK Pertanian dilakukan melalui peningkatan kualifikasi dengan memberikan beasiswa untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan melalui peningkatan kompetensi melalui kegiatan diklat, magang, seminar dan melalui kegiatan melakukan ujicoba proses produksi serta pengembangan inovasi. Capaian peningkatan mutu SDM berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3. Sedangkan jumlah secara keseluruhan adalah 231 dengan rincian sebagai berikut;

- a. S 3 : 5 orang
- b. S 2 : 79 orang
- c. S 1 : 73 orang
- d. D-IV : 2 orang
- e. D-III : 3 orang
- f. SMA : 61 orang
- g. SMP : 3 orang
- h. SD : 5 orang

Sampai dengan tahun 2019, jumlah widyaiswara yang telah menyelesaikan S-3 nya adalah 5 orang.

## 3. Pengembangan bahan ajar/modul, sistem dan model

Jumlah bahan ajar/modul yang telah berhasil disusun sampai dengan tahun 2013 adalah 197 judul, system yang telah tersusun 13 buah, dan model yang tersusun sejumlah 19 buah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah bahan ajar/modul/Buku Teks Siswa

No	Departemen	Jumlah modul/bahan ajar	Sistem	Model
A.	Bahan Ajar/Modul			
1	Agribisnis Tanaman dan Holtikultura	21		
2	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	21		
3	Agribisnis Tanaman dan Perkebunan	20		
4	Agroindustri	9		
5	Pengawasan Mutu	11		
6	Mekanisasi Pertanian	28		
7	Agribisnis Perbenihan & Kultur Jaringan Tanaman	24		
8	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	12		
9	Budidaya Perikanan Ikan Hias	21		
10	Budidaya Perikanan Air Tawar	24		
11	Agribisnis Ternak Ruminansia	22		
12	Agribisnis Ternak Unggas	22		
13	Kesehatan Hewan	25		
14	Teknologi Pengolahan Hasil Hutan	17		
15	Kimia Analis	17		
16	Kimia Industri	10		
	<b>Jumlah</b>	<b>304</b>		

Sumberdaya manusia PPPPTK Pertanian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Subbag Kepegawaian, pada tahun 2018-2019 sejumlah 231 orang yang terbagi dalam tenaga administratif sebanyak 141 orang dan tenaga edukatif (Widyaiswara) sebanyak 69 orang dan PTP 17 orang.

Data diatas merupakan “kekuatan” lembaga yang dapat dijadikan modal dasar dalam mengemban tugas dan fungsinya. Selain hal tersebut diatas kekuatan yang dimiliki oleh PPPPTK Pertanian adalah pengalaman melakukan pendidikan dan latihan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang baik untuk diklat PTK bidang pertanian, pondok pesantren, maupun bagi persiapan purna tugas dari berbagai instansi.

PPPPTK Pertanian sebagai lembaga diklat kejuruan, penyelenggaraan diklatnya sangat diwarnai dengan kegiatan-kegiatan praktek dilapangan dan atau di laboratorium. Kegiatan praktek ini sangat ditunjang oleh kegiatan produktif dilapangan, baik kegiatan uji coba produksi maupun kegiatan pengembangan inovasi teknologi. Namun saat ini kegiatan produktif dilapangan ini banyak mengalami kendala yang disebabkan beberapa hal, antara lain adalah semakin berkurangnya tenaga teknisi lapangan sebagai akibat dari berkembangnya SDM dari yang tadinya teknisi (lulusan SMP dan SMA) saat ini sudah berpendidikan S-1 dan S-2, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam kegiatan lapangan, serta semakin berkurangnya minat untuk melakukan kegiatan produktif dilapangan. Hal ini merupakan “kelemahan” lembaga yang harus segera diatasi.

## **B. Kondisi Eksternal**

Dalam menjalankan Tupoksinya PPPPTK Pertanian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi eksternal, baik yang berpengaruh positif maupun yang berpengaruh negatif. Kondisi eksternal yang berpengaruh positif merupakan “peluang” bagi PPPPTK Pertanian dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Visi nya. Peluang tersebut antara lain adalah :

1. Komitmen pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008, sesuai dengan amandemen ke 4 UUD



1945 pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Disisi lain belum semua satuan pendidikan memiliki tenaga kependidikan yang memadai seperti pustakawan, tenaga laboratorium. Kepala sekolah yang berlisensi kepala sekolah, dan pengawas yang berlisensi pengawas.
3. Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar dan menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau serta mendukung efisiensi pengelolaan e-administrasi pendidikan
4. Besarnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
5. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru

Kondisi eksternal yang dapat menghambat, yang merupakan “ancaman” bagi PPPPTK Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

1. Disatu sisi anggaran pendidikan semakin meningkat yaitu menjadi 20 % dari APBN, tetapi kenaikan anggaran pendidikan lebih banyak untuk keperluan pemenuhan tunjangan profesi Guru, Kepala sekolah dan Pengawas namun demikian tunjangan profesi tersebut belum memberikan dampak yang significant terhadap kinerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas.
2. Otonomi yang luas kepada daerah diatur dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak kepada bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri bagaimana meningkatkan mutu PTK nya, sementara itu koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah memerlukan biaya dan waktu serta tantangan tersendiri.
3. Selain itu tantangan eksternal berdasarkan Asean Economic Community (AEC) 2015 adalah :
  - a. *Free Movement of Goods and Services*

Terjadinya pergerakan barang-barang dan jasa tanpa ada hambatan

b. *Free Movement of Free Skill and Talented Labour*

Terjadinya mobilitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar dan memberi kesempatan kepada setiap pekerja untuk menemukan pekerjaan terbaik sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.

c. *Freedom of Establishment and Provision of Services and Mutual Recognition of Diplomas*

Menjamin setiap warga negara ASEAN bebas membuka praktek layanan di setiap wilayah ASEAN tanpa ada diskriminasi kewarganegaraan.

d. *Free Movement of Capital*

Menjamin bahwa modal atau kapital akan dapat berpindah secara leluasa diantara negara-negara ASEAN yang secara teoritis memungkinkan terjadinya penanaman modal secara bebas dan efisien

### C. Tantangan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dan harus diatasi dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan lima tahun kedepan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

1. Sertifikasi secara finansial telah meningkatkan ekonomi tenaga kependidikan, namun belum sejalan dengan peningkatan kompetensi. Tiga tahun kedepan dampak dari sertifikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan harus dijawab
2. Distribusi kualitas dan kuantitas Guru masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya pendidikan yang bermutu belum dapat dinikmati masyarakat di daerah yang jauh dari kota
3. Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berperan dalam peningkatan kemampuan Guru
4. Pembinaan Guru di sekolah secara parsial ditangani oleh unit kerja yang berbeda di lingkungan KEMENDIKBUD
5. Peran PPPPTK Kejuruan dalam pembinaan Guru untuk bidang kejuruan semakin kecil sebagai dampak dari sistem penganggaran untuk sertifikasi dan Kurikulum 2013
6. Pengelolaan Guru oleh Kabupaten/Kota seringkali dibawa ke ranah politik

7. Implementasi Kurikulum 2013 menuntut perubahan perilaku guru dalam melakukan pembelajaran dari guru aktif menjadi siswa aktif. Perubahan tersebut memerlukan pembiasaan secara berkala baik melalui pelatihan maupun pendampingan. Tiga tahun kedepan perlu upaya serius meningkatkan kompetensi pedagogi guru untuk menjawab keberhasilan Kurikulum 2013
  8. Pembinaan implementasi Kurikulum 2013 yang parsial antara Ditjen GTK dan Direktorat teknis (SD, SMP, SMK, dan SMK) membingungkan pihak sekolah dalam melakukan koordinasi
  9. Peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi Kurikulum 2013 belum optimal. Dominasi pembinaan masih dari Kemdikbud, Dinas merasa ditinggal
  10. Lembaga pelaksana pemberdayaan PTK (LPMP dan PPPPTK) perlu direvitalisasi dengan memperluas peran dan fungsi sampai menjangkau pembinaan sekolah sebagai satu kesatuan sistem peningkatan mutu
  11. Memenuhi komitmen global (*Millenium development goals, Education for all, dan Education for sustainable development*);
  12. Mengembangkan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan PTK yang berbasis pada kinerja.
  13. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal antar gender dan antar wilayah, dengan pendekatan penerapan sistem manajemen mutu dalam peningkatan berkelanjutan (*Continous improvement*).
  14. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan melalui peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mampu bersaing secara global
  15. Mendorong terbentuknya *community college* di SMK Pertanian, Kelautan dan Teknik Kimia sesuai dengan kebijakan MP3EI.
- Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 adalah :
- Dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan agar dapat mendudukkan sebagai sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025 dan enam negara besar dunia pada tahun 2050

- Dua kata kunci, yaitu percepatan dan perluasan. Mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan IPTEK.
  - Telah ditetapkan 8 program utama dan 22 kegiatan ekonomi utama.
  - Selain itu, juga ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011)
16. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha/industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi.
  17. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah.
  18. Mengimplementasikan kebijakan yang mengintegrasikan muatan karakter bangsa, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan.
  19. Mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ICT dalam bidang pendidikan.
  20. Melakukan perbaikan dan penataan ulang kedalam, baik dalam hal sumberdaya manusia (SDM) maupun fasilitas dan infrastruktur.

#### **D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK Pertanian**

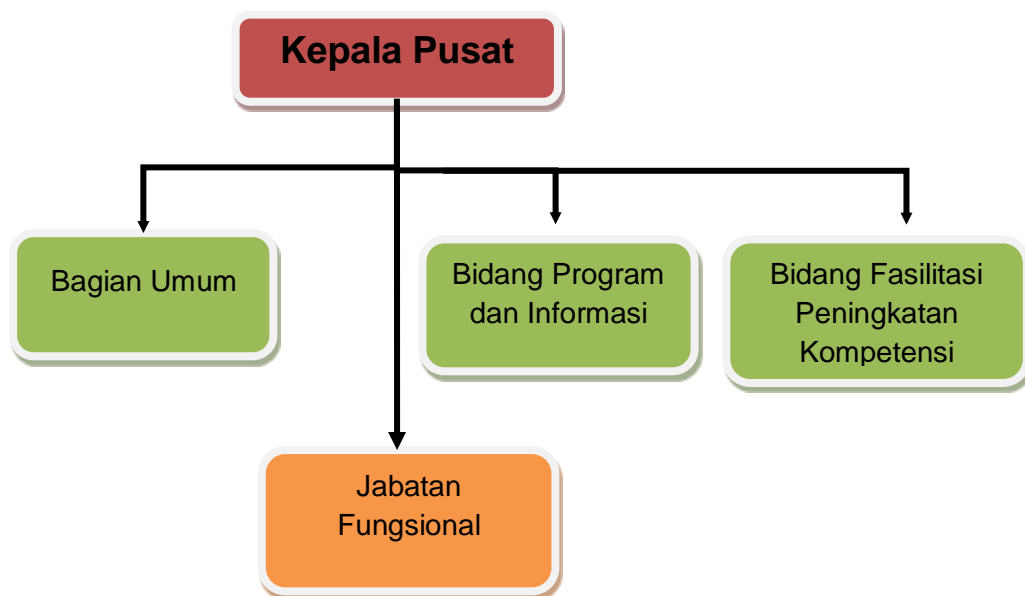
Berdasarkan Permendikbud nomor 41 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PPPPTK), PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugas di atas, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya, menurut Permendikbud No 41 Tahun 2012, organisasi PPPPTK Pertanian terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Program dan Informasi
- d. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi



Tugas dan fungsinya :

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran PPPPTK;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan.

2. Bidang Program dan Informasi

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, kerja sama antar lembaga serta pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan kerja sama antar lembaga di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

3. Bidang Fasilitasi

Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.



### BAB III

## VISI, MISI, NILAI-NILAI DAN TUJUAN STRATEGIS

#### A. Visi dan Misi PPPPTK Pertanian

Program Kerja PPPPTK Pertanian masih mnegacu pada Ketercapaian Renstra PPPPTK Pertanian tahun 2015-2019 sehubungan dengan penyusunan Renstra 2020 – 2024 masih dalam proses penyusunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat) sampai ke Lembaga lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sebagai sub sistem Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PPPPTK pertanian berdasarkan Permendikbud No. 41 Tahun 2012 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang Pertanian. Adapun fungsinya adalah seperti berikut:

- a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK

Berdasarkan tugas dan fungsinya PPPPTK Pertanian memiliki Visi yang mendukung ketercapaian dari Visi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan *“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”* maka PPPPTK Pertanian menetapkan Visi tahun 2015-2019 adalah:

#### Visi

***“Terbentuknya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkarakter dan professional serta berdaya saing global berlandasan gotong royong dengan mempertimbangkan ekosistem pendidikan”***

Berikut uraian penjelasan Visi PPPPTK Pertanian:

- Mutu pengelolaan berstandar nasional dengan mengadopsi Sistem Manajemen Mutu, menggunakan standar Reformasi Birokrasi Internal yang selalu ditingkatkan secara terus menerus (Continuous improvement),
- Materi diklat Relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi PTK dan relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah serta mengandung muatan yang berkaitan dengan kesepakatan global,
- Akses layanan merata untuk seluruh wilayah/daerah di Indonesia,
- Tersedia bagi seluruh unsur pendidikan (PTK dan asosiasi profesi),
- Layanan dalam proses diklat dilakukan secara cepat, tepat dan memuaskan pelanggan.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka Misi PPPPTK Pertanian tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan adalah:

MP.1 Mewujudkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional bidang Pertanian,

MP.2 Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang pertanian,

MP.3 Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan peningkatan profesionalisme dibidang pendidikan dan pertanian,

MP.4 Mewujudkansistem tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan.

Makna dari setiap butir Misi diatas adalah sebagai berikut:

MP.1 Mewujudkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional bidang Pertanian

Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan yang professional bidang adalah tugas pokok dari PPPPTK Pertanian, hal tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstandar berdasarkan kebutuhan kompetensi dan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi.

MP. 2 Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang pertanian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang pertanian yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga perlu peningkatan mutu dan relevansi layanan diklat. Beberapa program yang telah dan akan

dikembangkan dalam rangka mewujudkan mutu dan layanan diklat bidang pertanian adalah :

- 1) Diklat Modular. Layanan diklat dengan menggunakan modular ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan layanan yang disebabkan anggaran pemerintah yang belum mencukupi untuk menyentuh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang ada saat ini. Diklat modular ini terutama diperuntukkan bagi PTK yang memiliki hasil uji kompetensi “diatas standar minimal”, dimana calon peserta diklat akan diberikan modul-modul kompetensi sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan hasil uji kompetensi.
- 2) Program Pembentukan dan Pemberdayaan MGMP/MKKS/MKKPS. Tahun 2011 telah dibentuk MGMP sejumlah 50 kelompok kerja MGMP kelompok guru produktif pada 50 Kabupaten/Kota.
- 3) Pengembangan sistem diklat. Dengan tersedianya sistem diklat diharapkan PPPPTK Pertanian dapat memberikan layanan diklat dengan model kerjasama dengan pemerintah daerah, dimana setiap daerah dapat menyelenggarakan diklatnya sendiri dengan memperhatikan dan mengikuti sistem diklat yang disusun oleh PPPPTK Pertanian serta standar yang telah ditetapkan oleh PPPPTK Pertanian. PPPPTK Pertanian bertekad akan terus memantapkan program-program tersebut sambil mencari bentuk-bentuk layanan diklat lain yang dapat mempercepat ketercapaian pemerataan dan perluasan akses layanan.

### MP.3 Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan peningkatan profesionalisme di bidang pendidikan dan pertanian

Sesuai dengan misi Kemdikbud, maka layanan diklat harus tersedia dan terjangkau secara merata diseluruh pelosok nusantara dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Agar layanan diklat dapat merata pada seluruh wilayah nusantara, maka PPPPTK Pertanian sebagai unit pelaksana teknis (PTK) dari lembaga pusat, akan terus berusaha mencari alternatif untuk memperluas akses layanan diklat yang dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara. Beberapa program yang telah dan akan dikembangkan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses adalah :

- 1) Diklat jarak Jauh. Tahun 2009, 2010 dan 2011 telah melakukan layanan diklat jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sasaran mencapai 2440 peserta.
- 2) Pengembangan workstation (perwakilan PPPPTK di daerah). Tahun 2009, 2010 dan 2011 telah dilakukan pembentukan workstation di propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Papua. Melalui workstation ini telah dilakukan sejumlah diklat dan pengembangan SMK yang dilakukan oleh PPPPTK Pertanian dengan menggunakan dana Pemerintah daerah (APBD).
- 3) Peningkatan kompetensi pendidik dengan metode daring (dalam jaringan) Guru Pembelajar (GP) yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2015 – 2016 dengan scope wilayah di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

#### MP.4 Mewujudkan sistem tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan

Pelayanan diklat yang prima bagi peserta diklat/pelanggan eksternal merupakan citacita yang ingin dicapai oleh PPPPTK Pertanian yang tertuang di dalam Visi. Pencapaian layanan yang prima bagi pelanggan eksternal harus dimulai dari pengembangan sistem tata kelola lembaga yang mengarah kepada pencapaian kinerja yang baik. PPPPTK Pertanian sebagai organisasi harus memiliki struktur dengan organ-organ yang relevan dengan pencapaian dari tujuan organisasi tersebut, baik organik formal sesuai dengan ketetapan Permendiknas nomor 8 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maupun organik yang dikembangkan sendiri untuk mewadahi pengembangan peran dan memperlancar proses pencapaian tujuan organisasi/lembaga. Selain pengembangan organisasi dan program-program yang dikembangkan sebagai bagian dari aspek teknis. aspek manusia juga terus dikembangkan.

#### B. Nilai-Nilai PPPPTK Pertanian

Aspek manusia merupakan tata nilai yang dianut dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi yang harus dijadikan motto bagi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berhubungan satu sama lainnya. Tata nilai yang telah dianut dan akan terus dipertahankan adalah “*versatile, dedicated and caring*”. Dalam rangka mencapai visi, maka PPPPTK Pertanian telah sepakat menggunakan nilai-nilai lembaga sebagai berikut:

a. *Versatile*:

- Cakap : bekerja ikhlas, cerdas, berhasil dan tuntas
- Profesional : kompeten, jujur, menggandrungi keunggulan yang dimiliki

b. *Dedicated*:

- Loyal : konsisten terhadap pekerjaan
- Disiplin : tepat waktu dan taat peraturan
- Tanggung jawab : memiliki komitmen terhadap pekerjaan

c. *Caring* :

Peduli : tanggap terhadap kondisi, kebutuhan dan kepentingan lembaga, sesama dan masyarakat

Sejak penetapan Renstra periode 2015 – 2019, maka PPPPTK Pertanian sebagai UPT, berupaya menerapkan tata nilai utama Kemendikbud yang ditetapkan, sehingga dapat memandu seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sedang dilaksanakan. Tata nilai PPPPTK Pertanian mengacu pada tata nilai Kemendikbud 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya

### **C. Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian**

Untuk merealisasikan visi, PPPPTK Pertanian telah menetapkan dua tujuan strategis, agar dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dengan lebih jelas. Tujuan strategis ini pun berpedoman pada rumusan tujuan strategis Ditjen GTK 2015- 2019. Tujuan strategis PPPPTK Pertanian tahun 2015-2019 yang diturunkan dari tujuan strategis Ditjen GTK 2015-2019, yaitu:

Tujuan Strategis 1 PPPPTK Pertanian (TP.1): Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang pertanian, merupakan penjabaran untuk mendukung terwujudnya Misi 1 (Mewujudkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional bidang Pertanian), Misi 2 (Mewujudkan mutu dan relevansi layanan diklat bidang pertanian) dan Misi 3 (Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan peningkatan profesionalisme di bidang pendidikan dan pertanian) PPPPTK Pertanian.



Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada ketersediaan guru yang bermutu, karena guru adalah inti dari proses pendidikan dan menjadi kunci utama mutu pendidikan. Oleh karena itu diperlukan: (i) sistem peningkatan kompetensi yang menjamin meningkatnya subject knowledge dan pedagogical knowledge yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa; (ii) peningkatan profesionalisme guru melalui: pengembangan profesionalisme berkelanjutan bagi guru dalam jabatan berbasis data dan hasil Uji Kompetensi Guru.

#### D. Sasaran Strategis PPPPTK Pertanian

Selanjutnya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan strategis, maka perlu dijabarkan ke dalam sasaran strategis sehingga tujuan strategis lebih terukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. PPPPTK Pertanian telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sepanjang periode Renstra 2015 - 2019 dan akan menopang ketercapaian sasaran strategis Ditjen GTK. Untuk itu, penyusunan sasaran strategis PPPPTK Pertanian harus berpedoman pada sasaran strategis Ditjen GTK yang sesuai dengan tugas dan fungsi PPPPTK. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian T.P1 (Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang pertanian):

Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK Pertanian T.P1			
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target akhir Renstra (2019)
SS1.P1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya (pertanian)	IKK 1: Jumlah guru yang meningkat kompetensi bidangnya	198.577 orang
		IKK 2: Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya	4.337 orang (KS PS)

Secara rinci, perwujudan tujuan strategis yang dijabarkan kedalam sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan diatas, ditetapkan target capaiannya selama 5 tahun sebagai berikut:

**Target Kinerja Sasaran Strategis PPPPTK Pertanian Periode Renstra 2015 – 2019**

Sasaran Strategis	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya						
<b>IKK 1: Jumlah guru yang meningkat kompetensi bidangnya</b>	<b>orang</b>	<b>11.432</b>	<b>162.485</b>	<b>31.114</b>	<b>38.667</b>	<b>815</b>
<b>IKK 2: Jumlah tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya :</b>	<b>Orang</b>	<b>1.715</b>	<b>305</b>	<b>1.160</b>	<b>1.157</b>	<b>0</b>
1. Pengawas Sekolah		205	71	80	124	0
2. Kepala Sekolah		1.510	234	1.080	1.033	0

Peningkatan mutu layanan diklat meliputi kegiatan :

- Penyusunan Standar Kompetensi Guru (SKG)
- Uji kompetensi
- Pemetaan kompetensi PTK
- Penyusunan program diklat berkelanjutan untuk PTK (Pola diklat)
- Perbaikan dan pengembangan sarana prasarana diklat
- Peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM) lembaga
- Pengkajian dan pengembangan model-model diklat
- Pengelolaan dan penyelenggaraan diklat sesuai prosedur ISO
- Evaluasi proses penyelenggaraan dan dampak diklat
- Penyusunan laporan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan.
- Pengembangan system diklat
- Peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait

Peningkatan relevansi layanan diklat dilakukan melalui pengembangan inovasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal teknologi lainnya yang berkaitan dengan substansi kompetensi pada setiap jenis mata diklat. Sebagai lembaga pengembang dan pemberdaya PTK maka PPPPTK Pertanian harus kaya dengan informasi tentang Iptek. Pengayaan Iptek dapat dilakukan dengan mengadopsi, mengadaptasi dan melakukan eksplorasi gagasan/ide dari perkembangan Iptek itu sendiri. Melalui pengayaan IPTEK ini diharapkan diklat yang diselenggarakan oleh PPPPTK Pertanian selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan

pengembangan PTK dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

***“Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan diklat”***

Sesuai dengan misi Kemendikbud, maka layanan diklat harus tersedia dan terjangkau secara merata diseluruh pelosok nusantara dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Agar layanan diklat dapat merata pada seluruh wilayah nusantara, maka PPPPTK Pertanian sebagai unit pelaksana teknis (PTK) dari lembaga pusat, akan terus berusaha mencari alternatif untuk memperluas akses layanan diklat yang dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara. Beberapa program yang telah dan akan dikembangkan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses adalah :

1. Diklat jarak Jauh, Tahun 2009, 2010 dan 2011 telah melakukan layanan diklat jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan sasaran mencapai 2440 peserta.
2. Diklat Modular, layanan diklat dengan menggunakan moduler ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan layanan yang disebabkan anggaran pemerintah yang belum mencukupi untuk menyentuh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang ada saat ini. Diklat moduler ini terutama diperuntukkan bagi PTK yang memiliki hasil uji kompetensi “diatas standar minimal”, dimana calon peserta diklat akan diberikan modul-modul kompetensi sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan hasil uji kompetensi.
3. Pengembangan workstation (perwakilan PPPPTK di daerah), pada tahun 2009, 2010 dan 2011 telah dilakukan pembentukan workstation di propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Papua. Melalui workstation ini telah dilakukan sejumlah diklat dan pengembangan SMK yang dilakukan oleh PPPPTK Pertanian dengan menggunakan dana Pemerintah daerah (APBD).
4. Program Pembentukan dan Pemberdayaan MGMP/MKKS/MKKPS, pada tahun Pengembangan sistem diklat, pada tahun 2011 ini PPPPTK Pertanian telah mengembangkan system diklat. Dengan tersedianya sistem diklat diharapkan PPPPTK Pertanian dapat memberikan layanan diklat dengan model kerjasama dengan pemerintah daerah, dimana setiap daerah dapat menyelenggarakan diklatnya sendiri

dengan memperhatikan dan mengikuti sistem diklat yang disusun oleh PPPPTK Pertanian, serta standar yang telah ditetapkan oleh PPPPTK Pertanian.

PPPPTK Pertanian bertekad akan terus memantapkan program-program tersebut sambil mencari bentuk-bentuk layanan diklat lain yang dapat mempercepat ketercapaian pemerataan dan perluasan akses layanan.

***“Meningkatkan sistem tatakelola lembaga yang menjamin terselenggaranya layanan diklat yang prima”***

## BAB IV

### PROGRAM KERJA PPPPTK PERTANIAN TAHUN 2020

#### A. Deskripsi Program

URAIAN	VOL
Program Guru dan Tenaga Kependidikan	-
Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian [Base Line]	36
Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang Pertanian	-
Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	-
Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program Guru Penggerak	-
Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	-
Diklat Online Bagi Guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia (Tahap I)	-
Diklat Online Bagi Guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia (Tahap II)	-
Pelatihan Program Guru Penggerak Mapel	-
Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi [Base Line]	1
Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	-
Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	-
Pelatihan Kepala Sekolah	-
Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik [Base Line]	37
Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang Tematik	-
Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas	-
Pelaksanaan Seleksi dan Verifikasi Lapangan Penyedia Pelatihan	-
Pelatihan Program Guru Penggerak Guru Kelas	-
Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru Kelas	-
Supervisi dan Monitoring Program Merdeka	-

URAIAN	VOL
Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan [Base Line]	1
Penyusunan dan Pengembangan Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
Penyusunan dan Pengembangan Konten Model-Model Pembelajaran	-
Penyusunan Instrumen Evaluasi Program Guru Penggerak	-
Lokakarya Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-
Evaluasi Program Guru Penggerak	-
Lokakarya Evaluasi	-
Penyelenggaraan Pelatihan Guru untuk Guru	-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	1
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	-
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	-
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-
Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	-
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	-
Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1
Layanan Manajemen Satker	-
Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-
Workshop Penyusunan Rencana/Program Kegiatan UPT TA 2021	-
Koordinasi Teknis UPT Daerah dan Pusat	-
Koordinasi Program UPT dan Pusat	-
Pengelolaan kepegawaian	-
Review WBK PPPPTK Pertanian	-
Studi Banding Petugas MR dan ULP	-

URAIAN	VOL
Bimtek Pengembangan Repositori	-
Review Satuan Pengawasan Internal (SPI)	-
Workshop Kepenulisan Cara Praktis Menulis Buku	-
Sosialisasi Kontrak Kinerja 2020 dan Fakta Integritas	-
Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Anggaran	-
Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Bagi Pimpinan dan Staf Dilingkungan PPPPTK Pertanian	-
Bimtek Operator Diklat dan Panitia	-
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Fasilitas PPPPTK Pertanian	-
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	-
Magang Peningkatan SDM PPPPTK Pertanian	-
Workshop Penerapan Model-Model Pembelajaran	-
Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	-
Pencetakan Majalah	-
Bantuan Pencegahan Covid 19	-
Layanan Manajemen Pendapatan	-
Pelaksanaan diklat PNB	-
Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Mapel (PNBP)	-
Layanan Perkantoran [Base Line]	1
Gaji dan Tunjangan	-
Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-
Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran	-
Langganan Daya dan Jasa	-
Pemeliharaan Kantor	-
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	-

Deskripsi dari masing-masing program secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Model inovasi teknologi

Program ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan inovasi di PPPPTK Pertanian dalam bidang diklat, sistem dan manajemen, aplikasi teknologi informasi dan produksi, meningkatkan optimalisasi fasilitas lembaga dalam meningkatkan mutu layanan diklat. Sasaran dari program ini adalah tersusunnya model pembelajaran

### 2. Rancangan Program/Pedoman

Setiap program yang akan dilaksanakan di PPPPTK Pertanian ini selalu disusun rancangan programnya. Penyusunan rancangan program ini dimaksudkan agar setiap program yang akan dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah dicanangkan, karena rancangan program ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari latar belakang, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, strategi pelaksanaan, jadwal, penanggung jawab dan pembiayaan.

### Model inovasi teknologi

- Program ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan inovasi di PPPPTK Pertanian dalam bidang diklat, sistem dan manajemen, aplikasi teknologi informasi dan produksi, meningkatkan optimalisasi fasilitas lembaga dalam meningkatkan mutu layanan diklat. Sasaran dari program ini adalah tersusunnya 15 inovasi untuk pembelajaran
- Model diklat PKB berbasis skema SKKNI level IV (KG, PKB, Teknisi, Laboran, Adaftip, Produktif)
- Model diklat kurikulum 2013 (SD dan SMP) (untuk bidang Tematik di 4 zonasi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi)
- Modul PKB berbasis skema SKKNI level IV
- Modul KG/PKB tahap 2 berbasis skema KKNi level IV
- Pola diklat PKB bagi PTK berbasis skema KKNi level IV
- Digitalisasi Modul modul Pelatihan PKB bagi PTK basis KKNi Level IV

Model diklat adalah rangkaian dari rumusan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran dalam diklat yang disesuaikan dengan calon peserta diklat (Latar belakang pendidikan, pengalaman dan lain-lain) dan materi diklat yang akan disampaikan (Tingkat kesulitan, kedalaman, keluasan dan lain-lain). Dengan tersusunnya model-model diklat ini diharapkan diklat yang dilakukan oleh PPPPTK Pertanian dapat mencapai tujuan paket/materi diklat secara efektif dan efisien. Model diklat yang akan dikembangkan terdiri dari 1). Model



diklat guru produktif yang berbasis SKKNI level IV sesuai dengan paket keahlian secara Daring

- Penerbitan majalah lembaga
- Sikronisasi program dengan lembaga-lembaga terkait baik swasta dan negeri
- Rencana/Program 2021
- Review atau keterbacaan Modul
- Diklat PKB Produktif melalui Daring
- Diklat Tematik
- Analisis Kebutuhan Institusi

Penyusunan program kerja tahunan, dimulai dari kegiatan analisis kebutuhan institusi. Kegiatan analisis kebutuhan institusi ini dimulai dengan melakukan analisis ketercapaian Rencana strategis lembaga tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan rencana kegiatan pada tahun 2021, serta kegiatan dan output kegiatan pada tahun 2021 seperti yang telah dicanangkan didalam Program. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan dan output kegiatan pada tahun 2021 sudah sesuai dengan rencana ketercapaian Program 2020 – 2024.

3. Program sinkronisasi peningkatan mutu PTK.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan, dan merumuskan strategi implementasi kebijakan, dan sharing informasi diantara 12 PPPPTK dan LP2KS, serta merumuskan alternatif pemecahan masalah dalam melakukan tugas pokok dan fungsidi dalam pengembangan dan pemberayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya sinkronisasi peningkatan mutu PTK yang diikuti oleh 20 orang peserta dari PPPPTK, LP2KS

4. Sinkronisasi program peningkatan mutu PTK dengan Dinas Provinsi

Sinkronisasi program ini akan membahas seputar kebijakan GTK dalam peningkatan mutu PTK, strategi implementasi kebijakan sesuai dengan tupoksi masing-masing, Kerjasama penyelenggaraan diklat peningkatan mutu PTK dalam rangka mempercepat pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan yang dilakukan oleh PPPPTK Pertanian Cianjur.. Sinkronisasi program ini akan difokuskan kepada Dinas Pendidikan yang telah melakukan MoU, yaitu :

No	Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi/Kota	Bidang
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor	<b>PenguatanKepala Sekolah Penguatan Pengawas Diklat Guru Produktif</b>
2.	Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur	
3.	Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	
4.	Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu	
5.	Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang	
6.	Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan	
7.	Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	
8.	Dinas Pendidikan Kabupaten Subang	
9.	Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi	
10.	Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang	
11.	Dinas Pendidikan Kota Bandung	
12.	Dinas Pendidikan Kota Banjar	
13.	Dinas Pendidikan Kota Bogor	
14.	Dinas Pendidikan Kota Cirebon	
15.	Dinas Pendidikan Kota Sukabumi	
16.	Dinas Pendidikan Kab. Bengkayang	
17.	Dinas Pendidikan Kab. Kapuas Hulu	
18.	Dinas Pendidikan Kab. Kayong Utara	
19.	Dinas Pendidikan Kab. Ketapang	
20.	Dinas Pendidikan Kubu Raya	
21.	Dinas Pendidikan Kab. Landak	
22.	Dinas Pendidikan Kab. Melawi	
23.	Dinas Pendidikan Kab. Pontianak	
24.	Dinas Pendidikan Kab. Sekadau	
25.	Dinas Pendidikan Kota Singkawang	
26.	Dinas Pendidikan Kab. Sintang	
27.	Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak	
28.	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Karimun	
29.	Dinas Pendidikan Kab. Bintan	
30.	Dinas Pendidikan Kab. Lingga	
31.	Dinas Pendidikan Kab. Natuna	
32.	Dinas Pendidikan Kota Batam	

33.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang	
34.	Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka	
35.	Dinas Pendidikan Kab Bangka Barat	
36.	Dinas Pendidikan Kab. Bangka Selatan	
37.	Dinas Pendidikan Kab. Bangka Tengah	
38.	Dinas Pendidikan Kab. Belitung	
39.	Dinas Pendidikan Kab. Belitung Timur	
40.	Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang	
41.	Dinas Pendidikan Kab. Batanghari	
42.	Dinas Pendidikan Kab. Muara Bungo	
43.	Dinas Pendidikan Sarolangun	
44.	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Barat	
45.	Dinas Pendidikan Kerinci	
46.	Dinas Pendidikan Kab. Tebo	
47.	Dinas Pendidikan Kab. Muaro Jambi	
48.	Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur	
49.	Dinas Pendidikan Kab. Merangin	
50.	Dinas Pendidikan Kota Jambi	
51.	Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis	
52.	Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir	
53.	Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu J	
54.	Dinas Pendidikan Kab. Kampar	
55.	Dinas Pendidikan Kab. Kuantan Singingi	
56.	Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan	
57.	Dinas Pendidikan Kab. Rokan Hilir	
58.	Dinas Pendidikan Rokan Hulu	
59.	Dinas Pendidikan Kab. Siak	
60.	Dinas Pendidikan Kota Dumai	
61.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Agam	
62.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Dharmas	
63.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Mentawai	
64.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh	

65.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Padang Pariaman	
66.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Pasaman	
67.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat	
68.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan	
69.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Sawahlunto Sijunjung	
70.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Solok	
71.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Solok Selatan	
72.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Tanah Datar	
73.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi	
74.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kota Padang	
75.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang	
76.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kota Pariaman	
77.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	
78.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kota Sawah Lunto	
79.	Subdin PLS pada Dinas Pendidikan Kota Solok	
80.	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat	
81.	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Aceh Barat Daya	
82.	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Besar	
83.	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Jaya Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kab. Aceh Selatan	
84.	Dinas Pendidikan Kab. Aceh Singkil Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tamiang	
85.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tengah	
86.	Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Tenggara	
87.	Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Timur	
88.	Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Aceh Utara	

89.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bener Meriah	
90.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bireun	
91.	Dinas Pendidikan & Pengajaran Kab. Gayo Lues	
92.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Nagan Raya	
93.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Pidie	
94.	Dinas Pendidikan Kab. Simeulue	
95.	Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Bidang Dikluseporabud	
96.	Dinas Pendidikan & Pengajaran Kota Langsa	
97.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
98.	Dinas Pendidikan Kota Sabang	

#### 5. Penyusunan Model Peningkatan Kompetensi

Program ini bertujuan untuk menindaklanjuti dari tersusunnya pola diklat dan modul pembelajaran untuk jenjang dasar, lanjut, dan menengah yang telah tersusun pada tahun sebelumnya. Sasaran dari program ini adalah tersusunnya 104 modul pembelajaran yang terdigitalisasi.

#### 6. Pelaksanaan Diklat PNBP

Program ini bertujuan untuk mewadahi kerjasama dengan pihak lain dalam rangka tuisi yaitu Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan yang sebelumnya telah sepakat dalam Melaksanakan kerjasama serta tertuang dalam perjanjian kerjasama di tahun 2020.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Pelaksanaan program harus dimonitoring dan dievaluasi, kegiatan ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan efektifitas program. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi juga bermanfaat untuk perbaikan program dan data informasi peningkatan kinerja lembaga pada masa yang akan datang.

#### **A. Sasaran M&E**

Sasaran monitoring dan evaluasi pada implementasi program pada bidang program dan data informasi adalah :

- Perencanaan program
- Kesesuaian waktu pelaksanaan/realisasi program
- Kesesuaian hasil kegiatan
- Kesesuaian penggunaan dana

#### **B. Teknik Pengukuran**

Teknik pengukuran kinerja program dilakukan dengan mengukur ketersediaan/kesesuaian komponen program dibandingkan dengan kriteria keberhasilan program. Untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran, digunakan format pengukuran.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Agar target dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat direalisasikan secara tepat waktu maka program kerja ini perlu dijadikan pedoman semua staf bidang program data dan informasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kendala dalam mengimplementasikan program dan kegiatan perlu didiskusikan dan dipecahkan secara seksama agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

**Lampiran 1. Jadwal Program Kerja 2020**

**JADWAL PROGRAM/KEGIATAN PPPPTK PERTANIAN TAHUN 2020**

kode	Program/Kegiatan	Vol	Sat	Bulan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
023.16.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	-													
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-													
5634.007	Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian [Base Line]	36	Org												
5634.007.001	Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang Pertanian	-													
052	Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	-													
GP	Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program Guru Penggerak	-													
053	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	-													



A	Diklat Online Bagi Guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia (Tahap I)	-													
B	Diklat Online Bagi Guru SMK Pertanian dan Teknik Kimia (Tahap II)	-													
GP	Pelatihan Program Guru Penggerak Mapel	-													
5634.016	Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi [Base Line]	1	Org												
5634.016.001	Kepala Sekolah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	-													
053	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	-													
KA	Pelatihan Kepala Sekolah	-													
5634.019	Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik [Base Line]	37	Org												
5634.019.001	Guru yang Mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bidang Tematik	-													
053	Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru Kelas	-													
FB	Pelaksanaan Seleksi dan Verifikasi Lapangan Penyedia Pelatihan	-													

GP	Pelatihan Program Guru Penggerak Guru Kelas	-													
055	Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru Kelas	-													
FA	Supervisi dan Monitoring Program Merdeka	-													
5634.020	Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan [Base Line]	1	Mdl												
051	Penyusunan dan Pengembangan Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-													
PA	Penyusunan dan Pengembangan Konten Model-Model Pembelajaran	-													
PB	Penyusunan Instrumen Evaluasi Program Guru Penggerak	-													
052	Lokakarya Model-Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-													
A	Evaluasi Program Guru Penggerak	-													
C	Lokakarya Evaluasi	-													
PP	Penyelenggaraan Pelatihan Guru untuk Guru	-													

5634.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	1	Lay													
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	-														
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-														
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	-														
A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-														
054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	-														
A	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	-														
5634.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]	1	Lay													
5634.970.001	Layanan Manajemen Satker	-														
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-														
A	Workshop Penyusunan Rencana/Program Kegiatan UPT TA 2021	-														
C	Koordinasi Teknis UPT Daerah dan Pusat	-														
D	Koordinasi Program UPT dan Pusat	-														
054	Pengelolaan kepegawaian	-														

[illegible]

B	Pencetakan Majalah	-													
C	Bantuan Pencegahan Covid 19	-													
5634.970.002	Layanan Manajemen Pendapatan	-													
051	Pelaksanaan diklat PNB	-													
YY	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Mapel (PNBP)	-													
5634.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1	Lay												
001	Gaji dan Tunjangan	-													
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-													
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-													
A	Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran	-													
B	Langganan Daya dan Jasa	-													
C	Pemeliharaan Kantor	-													
E	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	-													